

## REFERENSI

### **Buku:**

- Abidin, Said Zainal. (2006). *Kebijakan publik*. (cetakan ketiga). Jakarta: Suara Bebas.
- Bell, Judith. (2006). *Melakukan proyek penelitian secara mandiri*. (edisi keempat). (Jacobus Embu Lato, Penerjemah). Jakarta: PT Indeks.
- Danim, Sudarwan. (1997). *Pengantar studi penelitian kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2004). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi*. (cetakan kedua). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hosio, Jusach Eddy. (2007). *Kebijakan publik dan desentralisasi: Esai-esai dari sorong*. (cetakan kedua). Yogyakarta: LaksBang Yogyakarta.
- Howlett, Michael dan M. Ramesh. (1995). *Studying public policy: Policy cycles and policy sub systems*. London: Oxford University Press.
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Kristiadi, J.B. (1998). Perspektif administrasi publik menghadapi tantangan abad XXI. Dalam Sularso Sopater, et al (Ed.). *Pemberdayaan birokrasi dalam pembangunan: Kumpulan karangan* (hlm. 9). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kumorotomo, Wahyudi dan Subando Agus Margono. (2004). *Sistem informasi manajemen* (cetakan kelima). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2006). *Membangun format baru otonomi daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Magill, Frank N. (1996). *International encyclopedia of government and politics*. (Volume two, 794-1510). Singapore: Toppan Company Pte. Ltd.
- May, Tim. (2002). *Social research: Issues, methods dan process*. (third edition). Buckingham, UK and Philadelphia, USA: Open University Press.
- Moenir, AS. (2006). *Manajemen pelayanan umum di indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Moeloeng, J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muljadi, M. Arief. (2006). *Pokok-pokok dan ikhtisar manajemen stratejik: Perencanaan dan manajemen kinerja*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Neuman, William Lawrence. (2003). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. USA: Pearson Education, Inc.
- Nurmandi, Achmad. (2006). *Manajemen perkotaan: Aktor, organisasi, pengelolaan daerah perkotaan dan metropolitan di Indonesia*. (cetakan ketiga, edisi revisi). Yogyakarta: Sinergi Publishing.
- Parsons, Wayne. (2006). *Public policy: Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan* (cetakan kedua). (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Patilima, Hamid. (2007). *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan dan Defny Holidin. (2007). *Reformasi dan inovasi birokrasi: Studi di kabupaten sragen*. Jakarta: Yappika dan Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Robbins, Stephen P. (2006). *Perilaku organisasi*. (Benyamin Molan, Penerjemah). Jakarta: PT Indeks.
- Said, M. Mas'ud. (2007). *Birokrasi di negara birokratis: Makna, masalah dan dekonstruksi birokrasi di indonesia*. Malang: UMM Press.
- Suharto, Edi. (2008). *Analisis kebijakan publik*. (cetakan keempat, edisi revisi). Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. (2003). *Sistem administrasi negara republik indonesia (SANRI)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Utomo, Sad Dian. (2003). Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Dalam Indra J. Piliang et al (Ed.). *Otonomi daerah: Evaluasi dan proyeksi* (hlm. 268). Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.
- Wahab, Solichin Abdul. (1991). *Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyudi, Isa et al. (2008). *Memahami kebijakan publik dan strategi advokasi: Sebuah panduan praktis*. Malang: In-TRANS Publishing.
- Widodo, Erna dan Mukhtar. (2000). *Konstruksi ke arah penelitian deskriptif*. Yogyakarta: Avirouz.

Winarno, Budi (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Yudoyono, Bambang (2003). *Otonomi daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736).

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* (Lembaran Negara Tahun 2008).

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MEN.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.

Pemerintah Kota Depok. *Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Kewenangan* (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33 Seri E).

\_\_\_\_\_. *Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah* (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 34 Seri D).

\_\_\_\_\_. *Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan* (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 60).

\_\_\_\_\_. *Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok*.

**Lainnya:**

Nainggolan, Luster. (1998). *Kinerja administrasi kependudukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat: Studi kasus pada kantor walikotamadya jakarta pusat*. Tesis. Program Pascasarjana Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.

Kuswandari, Henrica. (2005). *Penerapan strategi pelayanan prima dalam bidang kependudukan dan catatan sipil di wilayah kotamadya jakarta utara*. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Pelayanan Publik Universitas Indonesia.

Adrian, Muhammad Agus. (2007). *Pemilikan kartu tanda penduduk (ktp) dan kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan pengurusan ktp: Studi di kecamatan patangkep tutui kabupataen barito selatan propinsi kalimantan tengah*. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi Kekhususan Ilmu Kesejahteraan Sosial Konsentrasi Pembangunan Sosial Universitas Indonesia.

“Ulasan Singkat Nasional: Hasil Sensus Penduduk”, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diunduh 20 Juni 2008.

Wahyudi WP. (16 Agustus 2005). *Makna tertib dokumen kependudukan bagi reformasi pelayanan publik, penegakan hukum, demokrasi dan perwujudan good governance*. (hlm. 1). Diunduh 15 April 2008.  
<http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=GoodGovernance>

*Cegah ktp ganda, bikin sistem satu nomor*. (16 Nopember 2007). Diunduh 25 Januari 2008. <http://www.fajar.co.id/news.php%3Fnewid>

*Menata administrasi kependudukan*. (20 Pebruari 2008). Diunduh 15 April 2008.  
[http://www.simmandiri.com/site/berita\\_detail.php?id=112](http://www.simmandiri.com/site/berita_detail.php?id=112)

*Satu nusa, satu nomor identitas*. (28 Nopember 2007). Diunduh 25 Januari 2008. Koran Tempo, <http://www.pajak.go.id/members/hilman/news>

*Sistem informasi administrasi kependudukan*. (26 April 2007). Diunduh 15 April 2008. <http://www.metakom.web.id/content/view/16/44/>

Effendi, Sofian. *Implementasi kebijakan*. Diunduh 30 Juli 2008.  
<http://sofian.staff.ugm.ac.id/kuliah>

Pidato sambutan Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan, Departemen Dalam Negeri. (20-22 Mei 2002). Dalam acara *Konperensi nasional pengembangan pelayanan publik dibidang kependudukan* di Jakarta (hlm. 5)

Kota Depok dalam Angka 2003 (2004).

Kota Depok dalam Angka 2007 (2007).

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok. *Perencanaan strategis (Renstra) 2007-2011*.

